



SEBA : SEPUTAR PENGABDIAN Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

COACHING CLINIC PENGEMBANGAN KAPASITAS KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN WALANTAKA KOTA SERANG

Titi Stiawati, Arenawati, Andriyana, Anas, Muhamad Luay, Novan Hermawan
Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The problem faced by the Walantaka Village Government is the lack of support from village community institutions, especially RT/RW in the field of administrative services and LPM (Community Empowerment Institution) in the field of village community empowerment. The purpose of this PKM is to provide training to be able to collaborate with stakeholders. The classical method used is that the RT head, RW head and LPM administrators of Walantaka Village are gathered in the village office hall with 2 training sessions. The first session before the material is delivered, a pre-test is held to measure the extent of understanding of the RT/RW heads and LPM administrators. The session is given practice on how to fill out the administration book that must be in the RT/RW administrators and in the LPM administration and is given games that can build effective communication. This second session ends with a Post Test, to measure the extent of acceptance of the RT/RW heads and LPM administrators regarding the material and practices that have been given. To realize the welfare of the community in the sub-district area, of course it cannot be implemented by the Lurah and his sub-district apparatus alone, but it requires support from the sub-district community institutions as partners at the sub-district level. In orderly administrative services, for example, support is needed from the RT head and RW head in helping to provide the required data. If the RT head and RW head cannot help optimally because they do not know what their main duties and functions are, then it is certain that the services provided by the sub-district will not be orderly in administration. Conclusion This coaching clinic activity increases the understanding and capacity of the RT/RW heads and LPM administrators in Walantaka Sub-district in carrying out their functions and roles in the community. Through this coaching, participants gain new insights regarding village-level governance.

Keyword : Coaching Clinic, Service, Administrative Order

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kelurahan Walantaka adalah kurangnya dukungan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan, khususnya RT/RW dibidang pelayanan administrasi dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dibidang pemberdayaan masyarakat kelurahan. Tujuan PKM ini yaitu memberikan pelatihan untuk dapat melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Metode klasikal yang digunakan yaitu ketua RT, ketua RW dan pengurus LPM Kelurahan Walantaka dikumpulkan di aula kantor kelurahan dengan 2 sesi palatihan. Sesi pertama sebelum disampaikan materi, diadakan pre-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman para ketua RT/RW dan pengurus LPM. Sesi diberikan praktik cara mengisi buku administrasi yang harus ada di pengurus RT/RW maupun di kepengurusan LPM serta diberikan permainan yang sifatnya dapat membangun komunikasi yang efektif. Sesi kedua ini diakhiri dengan Post Test, untuk mengukur sejauhmana penerimaan para ketua RT/RW dan pengurus LPM terkait materi dan praktik yang telah diberikan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelurahan, tentu tidak bisa dilaksanakan oleh Lurah beserta



perangkat kelurahannya saja, melainkan perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra yang ada di tingkat kelurahan. Dalam tertib administrasi pelayanan misalnya, dibutuhkan dukungan dari ketua RT dan ketua RW dalam membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan. Apabila ketua RT dan ketua RW tidak dapat membantu secara optimal karena ketidaktahuannya terkait apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, maka bisa dipastikan pelayanan yang diberikan kelurahan tidak tertib administrasi. Kesimpulan Kegiatan *coaching clinic* ini meningkatkan pemahaman dan kapasitas para Ketua RT/RW serta pengurus LPM di Kelurahan Walantaka dalam menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat. Melalui pembinaan ini peserta mendapatkan wawasan baru terkait tata kelola pemerintahan tingkat kelurahan.

Kata Kunci : *Coaching Clinic*, Pelayanan, tertib Administrasi

PENDAHULUAN

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, peran Ketua RT/RW dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat krusial untuk menciptakan sistem tata kelola yang efisien di tingkat paling dasar, yakni kelurahan. Ketua RT/RW adalah garda terdepan dalam pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sedangkan pengurus LPM berfungsi mendukung partisipasi masyarakat serta pemberdayaan dalam beragam aspek pembangunan. Ketua RT/RW dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan. Mereka memainkan peran vital sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi penggerak pelaksanaan program-program pemberdayaan dan layanan publik.

Namun, saat menjalankan tugas sehari-hari, banyak Ketua RT/RW dan pengurus LPM yang belum sepenuhnya mengerti peran strategis mereka dalam sistem pemerintahan dan pembangunan lokal. Berbagai tantangan muncul, termasuk rendahnya kemampuan manajerial, kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan, serta terbatasnya pemahaman tentang aturan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal, koordinasi antar lembaga yang kurang baik, dan keterlibatan warga yang minim dalam proses pembangunan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diadakan kegiatan *Coaching Clinic* Pengembangan Kapasitas Ketua RT/RW dan Pengurus LPM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan bekal praktis dan strategis bagi para pemangku kepentingan di level kelurahan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta tentang tugas dan fungsi mereka, meningkatkan kemampuan dalam menyusun program kerja, serta memperkuat komunikasi dan kerjasama antar lembaga masyarakat.

Kelurahan Walantaka, yang sedang berkembang dengan dinamika sosial yang kompleks, memerlukan peran aktif dan fleksibel dari para Ketua RT/RW dan pengurus LPM. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan akan terjalin sinergi antara struktur pemerintahan kelurahan dan masyarakat, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Kegiatan *Coaching Clinic* ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan di tingkat lokal, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur non-struktural, kegiatan ini diharapkan



dapat menjadi langkah nyata untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kelurahan Walantaka.

METODE PELAKSANAAN

Peningkatan kapasitas ketua RT/RW dan pengurus LPM Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang melalui program pengabdian dosen dan mahasiswa magister administrasi publik menggunakan metode klasikal yaitu ketua RT, ketua RW dan pengurus LPM Kelurahan Walantaka dikumpulkan di aula kantor kelurahan dengan 2(dua) sesi palatihan. Sesi pertama, sebelum disampaikan materi, diadakan pre-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman para ketua RT/RW dan pengurus LPM. Kemudian setelah itu diberikan materi tentang apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Sesi Kedua, diberikan praktik cara mengisi buku administrasi yang harus ada di pengurus RT/RW maupun di kepengurusan LPM serta diberikan permainan yang sifatnya dapat membangung komunikasi yang efektif. Sesi kedua ini diakhiri dengan Post Test, untuk mengukur sejauhmana penerimaan para ketua RT/RW dan pengurus LPM terkait materi dan praktik yang telah diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang

Kelurahan Walantaka terbentuk setelah terbitnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Lima Belas Desa Menjadi Kelurahan di Empat Kecamatan yang diundangkan pada tanggal 14 Juni 2013. Kelurahan Walantaka memiliki luas 2,81 KM² (dua koma delapan puluh satu kilo meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pipitan dan Kelurahan Pengampelan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigoong dan Kelurahan Pasuluhan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pager Agung dan Kelurahan Tegal Sari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran.

Jumlah penduduk Kelurahan Walantaka semester 1 tahun 2024 adalah sebanyak 4.327 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.210 jiwa dan perempuan 2.117 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.384 KK yang tersebar di 17 (tujuh belas) wilah rukun tetangga dan 5 (lima) rukun warga.

b. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang

Perubahan status desa menjadi kelurahan berimplikasi kepada tata kelola dan nomenklatur Pemerintahan Desa Walantaka, semisal Desa Walantaka sebelum terbit perda nomor 5 tahun 2013 dipimpin oleh Kepala Desa yang berasal dari masyarakat setempat dan dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Walantaka itu sendiri, tetapi setelah statusnya menjadi Kelurahan Walantaka dipimpin oleh seorang Lurah yang



berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang memenuhi persyaratan dan diangkat langsung oleh Wali Kota Serang.

Semangat dari perubahan desa menjadi kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lurah dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat selain didukung dengan perangkat kelurahan juga dibantu oleh mitra dalam hal ini lembaga kemasyarakatan kelurahan yang menurut permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, 2018) terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk itu diperlukan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mengetahui dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

c. Gambaran Umum Peserta *Coaching Clinic*

Peserta *Coaching Clinic* Peningkatan Kapasitas Ketua RT/RW dan Pengurus LPM Kelurahan Walantaka terdiri dari 5 (lima) orang Ketua Rukun Warga, 12 (dua belas) orang Rukun Tetangga yang dapat dilihat dalam tabel 1. dan 3 (tiga) orang pengurus LPM Kelurahan Walantaka dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1. Peserta *Coaching Clinic* dari unsur RT/RW

No. Urut	RW	No. Urut	RT	Lingkungan
1.	Ketua RW. 001	1.	Ketua RT. 001	Walantaka
		2.	Ketua RT. 008	Dukuh Raden
		3.	Ketua RT. 012	Pondok Walantaka Indah
2.	Ketua RW. 002	4.	Ketua RT. 005	Tonjong
		5.	Ketua RT. 006	Tonjong
3.	Ketua RW. 003	6.	Ketua RT. 002	Pesanggrahan
		7.	Ketua RT. 007	Pesanggrahan
		8.	Ketua RT. 009	Pesanggrahan
4.	Ketua RW. 004	9.	Ketua RT. 004	Winong
		10.	Ketua RT. 011	Winong
5.	Ketua RW. 005	11.	Ketua RT. 003	Pesanggrahan
		12.	Ketua RT. 010	Pesanggrahan

Tabel 2. Peserta *Coaching Clinic* dari unsur Pengurus LPM

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua LPM	1 Orang
2.	Sekretaris LPM	1 Orang
3.	Bendahara LPM	1 Orang

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelurahan, tentu tidak bisa dilaksanakan oleh Lurah beserta perangkat kelurahannya saja, melainkan perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra yang ada di tingkat kelurahan. Dalam



tertib administrasi pelayanan misalnya, dibutuhkan dukungan dari ketua RT dan ketua RW dalam membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan. Apabila ketua RT dan ketua RW tidak dapat membantu secara optimal karena ketidaktahuannya terkait apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, maka bisa dipastikan pelayanan yang diberikan kelurahan tidak tertib administrasi.

Begitu juga terkait proses perencanaan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat tidak dapat disusun secara efektif dan efisien karena dukungan data yang diberikan oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) kurang memadai.

Pelaksanaan *Coaching Clinic* oleh dosen dan mahasiswa Magister Administrasi Publik (MAP), Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menjadi penting untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan Walantaka melalui peningkatan kapasitas ketua RT/RW dan pengurus LPM.

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Magister Administrasi Publik Untirta adalah memberikan *Coaching Clinic* kepada ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dalam tabel 1. diatas serta kepada pengurus LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Walantaka sebagaimana dalam tabel 2

d. Materi Pelatihan

1. Tugas dan Fungsi RT dan RW

RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara warga dengan pemerintah dan memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial di lingkungan.

- a. RT/RW sebagai wadah partisipasi warga dalam pembangunan.
- b. Tugas pokok:
 - Menyampaikan dan menerima informasi dari/ke warga.
 - Menyusun dan melaksanakan program kerja lingkungan.
 - Membantu pelayanan administrasi kependudukan.
 - Mengelola keamanan dan ketertiban lingkungan.

2. Peran LPM dalam Pembangunan

LPM adalah lembaga yang membantu kelurahan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan yang bersumber dari aspirasi warga.

- a. Fungsi LPM sebagai fasilitator musrenbang.
- b. Peran LPM dalam:
 - Menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah.
 - Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
 - Mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

3. Tata Kelola dan Administrasi

Administrasi menjadi dasar dari pengelolaan kelembagaan yang akuntabel dan transparan. RT/RW dan LPM wajib memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang tertib, Adapun jenis administrasi terdiri dari :

- Buku Data Warga



- Buku Notulen Rapat
 - Buku Kas Keuangan
 - Laporan kegiatan
4. **Kolaborasi RT/RW dan LPM**
Kekuatan pembangunan lokal terletak pada sinergi antar lembaga. RT/RW dan LPM harus bekerja dalam satu visi, saling mendukung, dan membagi peran sesuai kapasitasnya. Adapun Kolaborasi ini melalui:
- Rapat koordinasi lintas Lembaga
 - Program kerja bersama tahunan
 - Evaluasi dan perencanaan bersama kegiatan lingkungan

Dokumentasi :



Penyampaian Materi oleh Dr. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si



Penyampaian Materi oleh Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si



RT , RW & LPM yang hadir dalam pelatihan



Penyerahan cinderamata pada RW

SIMPULAN

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas para Ketua RT/RW serta Pengurus LPM Kelurahan Walantaka dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan lebih efektif. Melalui pendekatan coaching clinic, para peserta diajarkan cara mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan dan pemecahan masalah di tingkat kelurahan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan manajerial mereka.

Beberapa poin penting yang diperoleh dalam pelatihan ini antara lain:

1. Peningkatan Kepemimpinan: Para peserta diberikan wawasan tentang kepemimpinan yang adaptif dan solutif untuk menghadapi perubahan dan dinamika sosial di kelurahan.
2. Pengelolaan Konflik dan Kolaborasi: Para peserta diajarkan teknik-teknik efektif dalam menangani konflik antarwarga serta bagaimana membangun kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak.
3. Peningkatan Keterampilan Komunikasi: Pelatihan ini memperkuat keterampilan komunikasi dalam menyampaikan informasi dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat.



4. Penyusunan Program Pemberdayaan: Peserta mendapatkan pemahaman tentang cara merencanakan dan menyusun program pemberdayaan yang dapat mengoptimalkan potensi warga dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan Ketua RT/RW dan Pengurus LPM dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien, memiliki kemampuan lebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berdaya saing. Pelatihan ini juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kemajuan kelurahan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu Komalasari, S.Pd Sebagai Lurah Walantaka Kota Serang yang telah mengizinkan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Walantaka Kota Serang
2. RW, RT dan LPM se-kelurahan Walantaka Kota Serang

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Jakarta: Kemendagri.

Rifai, A. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kelembagaan Lokal*. Bandung: Alfabeta.

Hasibuan, M. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Setiawan, B. 2020. *Pembangunan Partisipatif dan Penguatan Kelembagaan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.